

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun Anggaran 2016 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang disampaikan secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja BAPPEDA Kota Malang dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan dan tupoksinya serta menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pelaksana teknis yang membidangi perencanaan pembangunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Malang menjalankan pelaksanaan tugasnya melalui berbagai kegiatan perencanaan tata kota, sosial budaya & ekonomi, pendataan dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud sesuai jenis dan alokasi biaya sebagaimana dituangkan dalam APBD Kota Malang 2016, maka disusunlah laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Malang Tahun 2016.

Pada Kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas peran aktif dan dukungannya baik pikiran maupun fisik sehingga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya untuk tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya LAKIP Bappeda Kota Malang tahun 2016, diharapkan diperoleh manfaat bagi semua pihak khususnya bagi Pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kota Malang dalam perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mendukung upaya peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Harapan berikutnya bahwa LAKIP ini dapat menjadi informasi yang berharga bagi penyusun LAKIP Pemerintah Kota Malang tahun berikutnya.

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 20 Februari 2017
KEPALA BADAN PERENCANAAN
DAN LITBANG
KOTA MALANG

Drs. WASTO, SH.,M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19610212 198303 1 025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, penyusunannya adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Adapun program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam menyusun anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018, Bappeda Kota Malang menetapkan rencana strategis Tahun 2014-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Bappeda Kota Malang sebagai bagian dari Pemerintah Kota Malang menetapkan visinya dengan mendasarkan pada salah satu Misi Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD. Adapun misi Kota Malang yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas dan fungsi adalah Misi **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Adil, Terukur Dan Akuntabel”**. Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Bappeda Kota Malang dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan kepada pelanggan internal dimana konsumen yang menerima layanan adalah lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kota Malang begitu juga memberikan pelayanan yang bersifat keluar atau eksternal yaitu kepada masyarakat.

Oleh karena Bappeda Kota Malang berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang akuntabel dan akan dipakai sebagai acuan dari SKPD lain yang ada maka dalam rangka Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Malang melaksanakan pelayanan intern.sebagai berikut :

- a. Penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang ;
- b. Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah bagi instansi Pemerintah Kota Malang ;
- c. Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan Daerah Kota Malang melalui MUSRENBANG Kota Malang ;
- d. Penyiapan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) ;
- e. Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
- f. Penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang sebagai berikut :
 - Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
- g. Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Malang, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visipembangunan jangka menengah Kota Malang “ Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat “.sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malangng tahun 2013-2018.Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Malang, maka BAPPEDA Kota Malang memiliki VISI sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN HANDAL”

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang mempunyai kewenangan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down “. Maka agar Pembangunan di Kota Malang terus berkembang maju dengan kualitas perencanaan pembangunan yang terpelihara dengan baik Bappeda Kota Malang bertekad melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam mendukung pembangunan Kota Malang, sesuai dengan program prioritas Pembangunan Kota Malang tahun 2013-2018.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah yang mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara koordinatif dan partisipatif. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dalam menjalankan perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif dan transparansi dengan melibatkan seluruh masyarakat dan membangun kemitraan yang berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada hubungan kemitraan antara pemerintah kota dan masyarakat, menuju Kota Malang yang Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

Upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang perlu dirumuskan misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Malang dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

Bertitik tolak dari visi diatas, misi Bappeda Kota Malang “ Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel, Konsisten dan Implementatif “. Dalam Tahun Anggaran 2015, Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Malang telah menetapkan dan melaksanakan 100(Seratus) kegiatan dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2015, yang sudah dilaksanakan dengan pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 14.594.968.000,- telah terealisasi sebesar Rp.12.740.241.425,- dengan capaian 87,29 %.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan hasil evaluasi capaian kinerja kegiatan memperoleh nilai antara 85 s/d 100 atau sangat berhasil. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 ini, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kualitatif, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan / kegagalan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2015.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Bappeda Kota Malang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Aspek Strategis Organisasi	9
D. Isu-Isu Strategis	11
BAB II: PERENCANAAN KINERJA	16
A. Perencanaan Strategis.....	16
B. Rencana Kinerja Tahunan	21
C. Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	37
B. Capaian Kinerja	38
C. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	48
D. Analisa Atas Efisiensi Sumberdaya	51
E. Analisis Program/Kegiatan Yang Mendukung Keberhasilan	53
F. Realiasi Anggaran	72
BAB IV: PENUTUP	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Daftar Nama Pegawai, NIP, Jabatan, Golongan Dan Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Masa Januari – Desember 2014	5
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai dan Kepangkatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang	7
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (Pns) Berdasarkan Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang	7
Tabel 1.4. Eselonisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang	8
Tabel 2.1. Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 – 2018	18
Tabel. 2.2. Matriks hubungan tujuan, sasaran, kebijakan dan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 – 2018	20
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Pimpinan Tertinggi	22
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV (Administrator, jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana)	24
Tabel 3. 1 Target, Realisasi Dan Capaian Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Tahun 2016	38
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2016 dengan tahun sebelumnya	40
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target Jangka Menengah Renstra 2013 -2018	45
Tabel 3.4 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan kondisi yang harus di pada tahun 2018	47
Tabel 3.5 Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2016	48
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	52
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan daerah tahun 2016	53
Tabel.3.8 Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015 dan 2016	72
Tabel 3.9 Tabel Realisasi Per Program Tahun 2016	

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM BAPPEDA KOTA MALANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang biasa disingkat AKIP adalah merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggung-jawabkan atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada setiap instansi pemerintah tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan.

Bappeda Kota Malang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, BP2T, BKD dan Lembaga Teknis Daerah, pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan harus membuat LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir Tahun Anggaran.

B. Struktur Organisasi dan Uraian Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi

1. Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Malang terdiri dari :

Kepala Badan;

a. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.

b. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

- 1) Subbidang Penelitian;
- 2) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi.

c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :

- 1) Subbidang Ekonomi;
- 2) Subbidang Sosial dan Budaya.

d. Bidang Tata Kota, terdiri dari :

- 1) Subbidang Prasarana dan Sarana;
- 2) Subbidang Tata Ruang.

e. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari :

- 1) Subbidang Pendataan dan Pelaporan;
- 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



PEMERINTAH KOTA MALANG
BAREN LITBANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JL. TUGU NOMOR 1 MALANG 65119 - TEL. 0341 - 366922 FAX. 0341 - 328771

Seperti yang tercantum di dalam Bab II, Pasal 2 Peraturan Walikota Malang No. 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Serta yang tercaum dalam pasal 3 bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1) Tugas Pokok :

Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.;

2) Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD;
- d. penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- e. penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
- f. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- i. pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
- j. penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
- k. pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
- l. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- m. pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- n. pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
- o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- q. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- r. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- t. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- u. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- v. penyusunan rencana pencapaian SPM;
- w. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- x. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- y. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- z. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
- aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- bb. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- cc. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- dd. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

a. Potensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bappeda memiliki 33 PNS berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang :

Tabel 1.1.
Daftar Nama Pegawai, NIP, Jabatan, Golongan Dan Pendidikan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
Masa Januari – Desember 2016

NO.	N A M A	NIP.	PANGKAT / GOL.	JABATAN	Pendidikan Terakhir
1	Drs. WASTO, SH, M.H	19610212 198303 1025	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Bappeda	S2
2	Ir. DIAH AYU KUSUMADEWI, M.T	19700714 199503 2 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris Bappeda	S2
3	Dra. RUKAYAH, M.Si	19620622 199103 2 003	Pembina (IV/a)	Kabid. Penelitian & Pengembangan	S2
4	Ir. HEROE AGOESDIJANTO	19600801 199103 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabid. Ekonomi, Sosbud	S1
5	Ir. M. ANISJANUAR, ST, MT	19750127 199901 1 001	Pembina (IV/a)	Kabid. Tata Kota	S2
6	MOH. SULTHON, S. Sos., M.M	19690313 199003 1 001	Pembina (IV/a)	Kabid. Data dan Evaluasi	S2
7	SISWANTO	19671108 199102 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag. Penyusunan Program	D3
8	Dra. LILIS RUKMINIWATI	19620705 198603 2 014	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubag. Keuangan	S1
9	GANIS INDAJANI, SE, MM.	10690103 199003 2 008	Pembina (IV/a)	Kasubag. Umum	S2
10	Drs. RUDI CAHYONO CATUR	19680606 198809 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubid. Penelitian	S1
11	ZAKARIA, S.AP	19690613 199602 1 001	Penata (III/c)	Kasubid. Publikasi & Dok.	S1
12	WILLSTARTARIPAR HATOQUAN, S.STP	19800629 199810 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasubid. Sosial dan Budaya	S1
13	Dra. SRI ENDANG SUCIATY	19621231 199303 2 029	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubid. Ekonomi	S1
14	AGUSTINA RATRI H, ST.,MPP,MAP	19770814 200312 2 006	Penata (III/c)	Kasubid. Tata Ruang	S2
15.	TRI SUCIATI, ST. MAP	19760403 200112 2 004	Penata Tk. I (III/d)	Kasubid Sarana Prasarana	S2
16	Drs. SUKARYONO	19601217 198303 1 021	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubid. Pendataan & Pelaporan	S1

17	YOGI HANDOYO WASESO, S.Sos	19811205 20051 1008	Penata (III/c)	Kasubid. Monitoring dan Evaluasi	S1
18	VERY KOESWIJAYANTI, S.E., M.Si	19750216 199602 2 001	Penata (III/c)	Penata	S2
19	LUH EKA PRAMAWATI, SE	19770524 199803 2 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	S1
20	MOCH. ZAINURRIDHO, SH, MM	19740529 199901 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pengadministrasi Umum	S2
21	DONNY WAHYU WIJAYA, ST	19810819 200604 1 010	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Planologi	S1
22	YON YUAN MARAIN, SE.	19770319 200903 1 002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata Laporan Keuangan	S1
23	RIZA SAADIAH, S.Si.	19850429 200903 2 007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Statistisi	S1
24	LENNA KRISWATI, ST	19800128 201001 2 012	Penata Muda Tk. I (III/b)	Perencana	S1
25	SOPHIA NUR, S.Si	19801218 200904 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Statistisi	S1
26	MALINDRA DISIX SUKARNO, S.Sos, MM	19830226 201001 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Data & Perencanaan	S2
27	MIRZA RONALD ADISAPUTRA, SE, MM	19780412 201101 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Calon Perencana	S2
28	HAMIDAH HENDRAYATI, S.T	19850429 200903 2 007	Penata Muda (III/a)	Staf Bid. Litbang	S1
29	PANDU ZANUAR SULISTYO, ST	10820109 201001 1 017	Penata Muda Tk. I (III/b)	Perencana	S1
30	ARIYANTO	19680104 199203 1 010	Penata Muda (III/a)	Caraka	SMA
31	LILIK SURYANINGSIH	19610120 200604 2 002	Pengatur (II/c)	Pengentri Data	SMA
32	WINDIANTO PRASETYO	19820219 200901 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pengelola Data	SMA
33	ZAINI	19760405 200701 1 021	Pengatur Muda (II/a)	Petugas Operasional Kebersihan	SMA

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai dan Kepangkatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

NO	PANGKAT	GOL	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/ c	1
2	Pembina Tk. I	IV/ b	2
3	Pembina	IV/ a	4
4	Penata Tk. I	III/ d	8
5	Penata	III/ c	4
6	Penata Muda Tk. I	III/ b	10
7	Penata Muda	III/ a	2
8	Pengatur Tk. I	II /d	-
9	Pengatur	II /c	1
10	Pengatur Muda Tk. I	II /b	-
11	Pengatur Muda	II /a	1
12	Juru Tk. I	I /d	-
13	Juru	I /c	-
14	Juru Muda Tk. I	I /b	-
15	Juru Muda	I /a	-
JUMLAH			33


BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JL. TUGU NOMOR 1 MALANG 65119 - TEL. 0341 - 366922 FAX. 0341 - 328771

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Pendidikan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	SD	0	0
2	SLTP	0	0
3	SMA/ STM	4	12,12%
4	D 3	1	3,03 %
5	S 1	16	48,48 %
6	S 2	12	36,36 %
JUMLAH		33	100 %

Tabel 1.4.

Eselonisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

JABATAN	GOL.	ESELON	NON ESELON	JML
Kepala Bappeda	IV/c	II.B	-	1
Sekretaris Bappeda	IV/b	III.B	-	1
Kabid. Tata Kota	IV/a	III.B	-	1
Kabid. Sosial Budaya & Ekonomi	IV/b	III.B	-	1
Kabid. Pendataan dan Evaluasi	IV/a	III.B	-	1
Kabid. Penelitian & Pengembangan	IV/a	III.B	-	1
Kasubid. Tata Ruang	III/c	IV.A	-	1
Kasubid. Prasarana& Sarana	III/d	IV.A	-	1
Kasubid. Sosial Budaya	III/d	IV.A	-	1
Kasubid. Ekonomi	III/d	IV.A	-	1
Kasubid. Monitoring & Evaluasi	III/c	IV.A	-	1
Kasubid. Pendataan & Pelaporan	III/d	IV.A	-	1
Kasubid. Penelitian	III/d	IV.A	-	1
Kasubid. Publikasi & Dokumentasi	III/c	IV.A	-	1
Kasubag. Penyusunan Program	III/d	IV.A	-	1
Kasubag. Umum	IV/a	IV.A	-	1
Kasubag. Keuangan	III/d	IV.A	-	1
Staf Bappeda Kota Malang	IV/a	-	0	0
	III/d	-	0	0
	III/c	-	1	1
	III/b	-	10	10
	III/a	-	2	2
	II/d	-	1	1
	II/c	-	1	1
	II/b	-	01	0
	II/a	-	1	1
	I/d	-	0	0
JUMLAH		17	16	33

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan, maupun pengalokasian sumberdaya yang memerlukan pemahaman tentang apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan tanggapan yang mendasar (*outline respon*) organisasi terhadap tantangan – tantangan mendasar yang dihadapi.

Lebih lanjut strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal. Sebagai suatu rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan mampu meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi/pelaksanaan dari suatu strategi itulah yang paling berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu strategi. Sebaik apapun suatu strategi, tidak akan berhasil apabila buruk dalam mengimplementasikannya. Sebaliknya, apabila suatu strategi disusun biasa-biasa saja, namun baik dalam melaksanakannya, niscaya akan membuat berhasil strategi tersebut.

Strategi bukan merupakan pedoman kaku (rigid) bagi implementasi karena filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan suatu organisasi dengan lingkungannya, sehingga tetap dimungkinkan adanya suatu fleksibilitas yang adaptif namun tetap relevan. Dalam suatu organisasi, strategi yang dipandang baik dan sesuai serta secara nyata dapat memberikan kontribusi kemajuan perlu dipertahankan keberadaannya. Sedangkan untuk strategi yang dipandang sudah tidak sesuai dan tidak dapat memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu untuk dirumuskan kembali dengan maksud agar hubungan antara faktor internal dan eksternal organisasi dapat terjalin kesesuaian dan keserasian kembali.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa strategi bagi suatu organisasi merupakan alat untuk meraih tujuan. Organisasi pemerintah yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas, akan kehilangan proyeksi terhadap keadaan organisasi di masa depan, dan tidak memiliki pedoman bagi peningkatan kinerja organisasi. Demikian pula misi yang telah diterjemahkan dalam kegiatan konkrit tidak akan memiliki arti tanpa adanya implementasi yang baik, belum lagi ditambah perubahan yang cepat dari keadaan suatu organisasi dalam pemerintahan seperti penambahan/ adanya suatu organisasi baru atau pengurangan/ hilangnya suatu organisasi lama tergabung ke dalam organisasi lainnya. Oleh karena itu,

yang sangat dibutuhkan adalah penguasaan tugas dan fungsinya dengan optimal sehingga proses-proses perencanaan pembangunan secara kolektif dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi harapan masyarakat.

Untuk itu, peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah seperti BAPPEDA harus selalu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan itu seharusnya diorganisir sehingga dapat menghasilkan tatanan organisasi yang benar-benar mampu mengemban visi dan misi pemerintah daerah.

Di samping adanya kejelasan visi dan misi BAPPEDA, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan kinerja BAPPEDA adalah strategi yang relevan. Dengan berpedoman pada strategi organisasi, maka garis wewenang, saluran komunikasi dan arus informasi serta mekanisme perencanaan dapat disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Dalam melaksanakan berbagai pilihan-pilihan alternatif yang berkaitan dengan pembangunan daerah tentu akan didasarkan pada pemilihan isu-isu strategis dalam menentukan prioritas kegiatan dan ini menjadi mandat dan tantangan mendasar yang dihadapi BAPPEDA dalam peningkatan kinerjanya.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BAPPEDA dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan eksternal dan internal. Selain itu dapat pula disebabkan karena adanya perubahan mandat dan visi BAPPEDA.

Melalui uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian dalam kerangka konseptual tentang peningkatan kinerja organisasi BAPPEDA yaitu sebagai suatu usaha untuk meningkatkan hasil-hasil kerja pegawai BAPPEDA dalam penyelenggaraan kegiatan. Berdasarkan fungsi yang menjadi misinya, yang dapat dinilai dari ukuran responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja BAPPEDA itu secara teoritis menyentuh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja umum suatu organisasi yaitu dari faktor internal : pertama, aspek input / sumber daya berupa SDM, ekonomi (anggaran/keuangan), sarana prasarana/ fasilitas, data dan informasi, serta budaya organisasi; kedua, aspek proses manajemen melalui unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi; dan ketiga aspek output / hasil yang meliputi produk dan pelayanan yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan.

Setiap unsur ini memiliki potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi baik dari segi peningkatan maupun penurunan.

Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja BAPPEDA, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, kondisi alam dan kelompok – kelompok yang berkaitan dengan penyediaan input, proses pelaksanaan dan pemanfaat output.

Berdasarkan konsep strategi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, maka BAPPEDA menetapkan strategi yang diwujudkan dalam kebijakan dan program berikut :

- Menjabarkan tugas pokok dan fungsi kelembagaan melalui keterpaduan koordinasi, sinkronisasi, serta bottom up planning dan top down planning;
- Memanfaatkan dan memadukan instrumen perencanaan dalam implementasi program dan kegiatan;
- Meningkatkan strategi perencanaan daerah melalui penelitian;
- Meningkatkan sistem informasi pembangunan melalui penyediaan informasi perencanaan, proses, monitoring, evaluasi dan hasil-hasil pembangunan;
- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan melalui temuan deviasi atas perencanaan yang telah disepakati bersama dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis yang dilakukan, akan diperoleh isu-isu yang bernilai sangat strategis. Isu-isu yang sangat strategis tersebut dapat dijadikan rangkaian strategi yang dapat diterapkan dalam usaha peningkatan kinerja BAPPEDA Kota Malang.

D. ISUS-ISU TRATEGIS

Bappeda Kota Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 820.243 jiwa, mengalami pertumbuhan pada tahun 2013 sebanyak 845.865 Jiwa (sumber data : Dispendukcapil Kota Malang) yang mengakibatkan permasalahan pembangunan yang semakin besar dan kompleks, oleh karena itu BAPPEDA didalam melaksanakan tugasnya menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan alternatif- alternatif pemecahan masalah.

Dalam upaya penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis, efektif, efisien dan partisipatif, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi ke depan antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
2. Belum optimalnya pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Malang;

3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi tumpang tindihnya Dokumen Perencanaan;
4. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasamastakeholdersdenganBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang;
5. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
6. Terbatasnya data base yang mendukung penyusunan rencana;
7. Kurangnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk mendukung penyusunan rencanapembangunan;
8. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Eksternal

Dapat pula disampaikan yang menjadi isu strategis pembangunan Kota Malang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 yang terkait dengan tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan *Good Governance* dan Reformasi Birokrasi yang belum optimal; Esensi terwujudnya *good governance* dan reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat. Pemerintah Kota Malang berkomitmen meningkatkan layanan publik yang didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Langkah yang dilakukan adalah melalui penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- b. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; Upaya pengendalian pemanfaatan ruang diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi-nya, perijinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan kemitraan dalam penegakan hukum.

Untuk itu diperlukan sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.

c. Pengembangan Kerjasama Antar Kota dan Kabupaten;

Untuk lebih memposisikan Kota Malang sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperlukan kerjasama antar kota dan kabupaten di wilayah Malang Raya dengan mengedepankan posisi Kota Malang sebagai sentra pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui jejaring kerjasama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pengembangan kerjasama antar kota dan kabupaten didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari hal tersebut maka sangatlah diperlukan adanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan antara Pemerintah Daerah maupun dengan pihak swasta.



2. Internal

1. Terbukanya kerjasama dalam perencanaan pembangunan.

Keterbukaan informasi dan teknologi mendorong adanya kesempatan untuk lebih meningkatkan kerjasama daerah dengan daerah lain, lembaga swasta maupun lembaga lain dalam mengupayakan pembangunan yang lebih baik, termasuk di dalamnya dalam perencanaan pembangunan yang didukung dengan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan.

2. Adanya sistem perencanaan pembangunan yang baku dan legal.

Sistem perencanaan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004) memiliki kepastian yang tetap yang harus dilaksanakan di dalam menyusun perencanaan pembangunan di semua urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin meningkat kualitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada.

3. Perkembangan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi mampu merubah wawasan, pola pikir dan cara bertindak seluruh komponen pembangunan. Teknologi informasi yang berkembang pesat akan mendorong terwujudnya transparansi pembangunan. Namun demikian kemajuan informasi ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparat pemerintah daerah, sehingga secara bertahap aplikasi informasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyediaan data valid perencanaan pembangunan.

4. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan agar mampu menghilangkan ego sektoral SKPD.

Sikap ego sektoral ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka dipandang perlu adanya satu sikap bahwa perencanaan pembangunan ini untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai misi pemerintah daerah dengan mendapatkan kesempatan yang seimbang dengan tugas pokok masing-masing sektor atau SKPD. Sehingga masing-masing memiliki peran dan merupakan satu sistem dalam pembangunan pemerintah daerah.

5. Perlu optimalisasi database pembangunan.

Data merupakan cermin dari realisasi kondisi yang ada dan sebagai dasar didalam melakukan perencanaan pembangunan. Namun kondisi kesiapan data pembangunan daerah dirasakan masih belum optimal, ketersediaannya masih terbatas. Sehingga dapat memperlambat perencanaan pembangunan dan sebagai salah satu solusinya adalah perlu dilakukan pembaharuan data secara periodik dan berkelanjutan dengan variasi berbagai jenis data serta melakukan kerjasama dengan BPS untuk validasi data.

6. Adanya komitmen seluruh komponen perencana.

Komitmen komponen perencana ini sangat penting untuk mewujudkan perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dalam bab perencanaan kinerja memuat gambaran umum rencana strategis (Renstra) dan perjanjian kinerja.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Bappeda Kota Malang adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2013 – 2018, sehubungan dengan tugas dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Rencana Strategis Bappeda Kota Malang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2013 - 2018.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Malang, penyusunan Rencana Strategik Bappeda Kota Malang memedomani dan mempunyai kausalitas dengan RPJMD dengan merujuk pada Misi 5 yaitu Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang professional akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

1. Visi BAPPEDA Kota Malang

Visi merupakan pernyataan tentang gambaran kondisi ideal pada masa mendatang yang ingin dicapai oleh Bappeda Kota Malang. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Malang dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat. Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kota Malang berkewajiban menyusun rencana pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijakan perencanaan untuk masa yang akan datang.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang dirumuskan sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN HANDAL".

Adapun Visi dimaksud dapat dimaknai bahwa Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga perencana pembangunan mempunyai kewenangan dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sehingga BAPPEDA memiliki peran dan posisi strategis dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Malang. Menindaklanjuti hal tersebut maka BAPPEDA Kota Malang harus :

1. Berkualitas secara kelembagaan yaitu memiliki SDM aparatur yang handal. Handal berarti memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya, memegang teguh nilai nilai moral dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas;
2. Menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan melibatkan stake holder dan dilakukan secara transparan.

Sehingga rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedur, tepat sasaran dan responsive serta memberikan arah yang yang tepat bagi terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat.

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JL. TUGU NOMOR 1 MALANG 65119 - TEL. 0341 - 366922 FAX. 0341 - 328771

2. Misi BAPPEDA Kota Malang

Untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kota Malang, maka ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappededa. Adapun Misi yang telah dirumuskan

" Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel, Konsisten dan Implementatif ".

Misi ini diarahkan pada upaya peningkatan sistem pengelolaan Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi kinerja (output/outcome), memiliki keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, dokumen perencanaan dan penganggaran, dan antar Satuan kerja sehingga hasil perencanaan pembangunan dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah dalam jangka waktu sampai dengan 2018 yang perumusannya didasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan setelah penetapan visi dan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut disajikan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah:

Tabel 2.1.
Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategik
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 - 2018

Misi : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, konsisten dan implementatif

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018
Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai tahapan yang benar	Prosentase SKPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1. Prosentase SKPD yang telah menyusun dokumen renstra dan renja/RKT berkualitas baik	90%	95%	100%	100%	100%
			2. Prosentase Kecamatan yang melaksanakan musrenbang sesuai juknis	90%	95%	100%	100%	100%
			3. Prosentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja/RKT	90%	95%	100%	100%	100%
			4. Prosentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	80%	90%	100%	100%	100%

	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah	Prosentase luas wilayah yang telah sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi	0	5%	50%	75%	100%
	Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan	80%	90%	95%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan	Nilai survay kepuasan masyarakat	80,85	80,88	80,90	80,94	80,98

3. Strategi Mencapai Tujuan Dan Sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, Bappeda Kota Malang merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat yang meliputi penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.

Berikut disajikan hubungan tujuan, sasaran, kebijakan, program pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Malang.

Tabel. 2.2.

**Matriks hubungan tujuan, sasaran, kebijakan dan program
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 - 2018**

Tujuan : Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai tahapan yang benar

Sasaran		Kebijakan		Program	
1	Kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1	Sinkronisasi dan penyelarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah	2	Pemantauan musrenbang sejak di tingkat kelurahan dengan berpedoman pada ketentuan/juknis	2	Program Perencanaan Tata Ruang
3	Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	3	Optimalisasi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	3	Program Pengendalian Pemanfaatan ruang
4	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan	4	Optimalisasi fungsi, peran dan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKRD)	4	Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota menengah besar
		5	Melaksanakan analisa kebutuhan SKPD atas kajian, penelitian atau pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah	5	Program perencanaan pembangunan ekonomi
		6	Menjalin kerjasama yang intensif dan harmonis dengan instansi berwenang bidang statistik (BPS)	6	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
		7	Pelaksanaan koordinasi internal secara intensif dan komunikatif	7	Program Perencanaan Sosial Budaya
				8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				9	Program Peningkatan pengembangan sistem palaporan capaian kinerja dan keuangan
				10	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
				11	Program peningkatan sumberdaya aparatur
				12	Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), dan akan dilaksanakan oleh Satuan kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan ada 3 hal yang harus dipenuhi yaitu sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra yang akan dicapai pada tahun 2016 oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Malang melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja dan secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian tujuan. Indikator kinerja dapat berupa output maupun outcomes.

Target merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2016.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2016 disajikan dalam lampiran 1.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.


Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya serta sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi organisasi.

Berikut perjanjian kinerja Badan Perencana Pembangunan Daerah mulai dari Perjanjian Kinerja Pimpinan tertinggi, Jabatan Administrator, jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Pimpinan Tertinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	• Prosentase SKPD yang telah menyusun dokumen renstra dan renja/RKT berkualitas baik	100 %	• Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.866.796.000
	• Prosentase Kecamatan yang melaksanakan musrenbang sesuai juknis	100 %	• Program Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	288.644.000
	• Prosentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja/RKT	100 %		
	• Prosentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	100 %		
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah	• Prosentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan peraturan zonasi	50%	• Program Perencanaan tata ruang	2.582.000.000
			• Program pengendalian pemanfaatan ruang	300.000.000
			• Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar.	2.105.000.000
Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	• Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah	95%	• Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.235.657.500
			• Program perencanaan sosial budaya	3.122.061.000

<p>Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai survey kepuasan masyarakat 	<p>80,90</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program pelayanan administrasi perkantoran • Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur • Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur • Program Peningkatan pengembangan sistem palaporan capaian kinerja dan keuangan • Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 	<p>1.419.352.500</p> <p>330.000.000</p> <p>50.000.000</p> <p>171.300.000</p> <p>218.740.000</p>
--	--	--------------	--	---

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV (Administrator, jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana)

Perjanjian Kinerja Eselon III			Perjanjian Kinerja Eselon IV			Program/Kegiatan	Anggaran
Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target		
Terlaksananya pengadministrasian surat masuk dan keluar yang didistribusikan dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar	2500	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
			Terlaksananya Pengadministrasian surat keluar masuk selama satu tahun	Jumlah surat keluar masuk selama 1 tahun	2500	Penyediaan jasa surat menyurat	35,000,000
			Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	2 pesawat telpon, 12 bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37,500,000
			Tersedianya ruang kantor yang bersih dan nyaman	Jumlah Jasa Kebersihan kantor	300 kali	Penyediaan jasa kebersihan kantor	75,000,000
			Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	Jumlah Alat Tulis Kantor	49 Jenis ATK	Penyediaan alat tulis kantor	60,000,000
			Tersedianya barang cetakan kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	16 Jenis	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45,000,000
			Tersedianya komponen isntansi listrik/penerangan yang memadai	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,000,000
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 buah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,000,000
			Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bahan Bacaan peraturan perundang - undangan	4 jenis koran, 50 buku	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000
			Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	Jumlah konsumsi rapat dan tamu	12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman	250,000,000

			Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi daerah	85 kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	660,852,500	
			Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen pengadaan barang jasa	50 dokumen	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa	51,000,000	
			Tersedianya mobil hias untuk Pawai Pembangunan	Jumlah mobil hias	2 buah	Pawai Pembangunan	25,000,000	
			Tersedianya Sistem Informasi dan Aplikasi Bappeda	Jumlah pengembangan Sistem Informasi Internal SKPD	1 Aplikasi	Pengembangan Sistem Informasi Internal SKPD	50,000,000	
			Tersedianya Mesin Absensi Fingerprint	Jumlah mesin absensi Finger Print	1 buah	Pengadaan Mesin Absensi Fingerprint	10,000,000	
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	Prosentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
			Tersedianya mebeulair kantor yang memadai	Jumlah peralatan mebeleur kantor	4 jenis	Pengadaan mebeleur	150,000,000	
			Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas	3 mobil 16 sepeda motor	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	170,000,000	
			Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	15 AC, 2 notebook, 8 printer	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,000,000	
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat	100%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					
			Tersedianya SDM yang handal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	4 orang	Pendidikan dan pelatihan formal	50,000,000	

Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Prosentase laporan Keuangan dan Kinerja yang tepat waktu	100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
			Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Laporan Kinerja	1 Dokumen	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7,500,000
			Tersedianya laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	Penyusunan laporan keuangan semesteran	64,000,000
			Tersedianya dokumen RKA, DPA, DPPA	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	77 kegiatan APBD Murni, 90 kegiatan APBD Perubahan	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	6,000,000
			Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan	5 Laporan (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, CALK), 727 SPP, 727 SPM	Penatausahaan keuangan	30,000,000
			Terlaksananya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK)	Jumlah Dokumen Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK)	1 Dokumen	Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK)	191,800,000
Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Fasilitasi Dewan Riset daerah	100%	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah				
			Terlaksananya Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Jumlah Buku Agenda Riset Daerah (ARD) dan 50 Buku SIDA	50 buku	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	218,740,000

Terlaksananya kecamatan yang melaksanakan musrenbang dengan baik	Prosentase kecamatan yang melaksanakan musrenbang dengan baik	100%	Program perencanaan pembangunan daerah				
			Terlaksananya Musrenbang RKPD 2017	Jumlah peserta Musrenbang RKPD 2017	200 orang	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2017	252,600,000
			Terlaksananya Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017	Jumlah Peserta Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017	1 Dokumen	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017	183,720,000
			Terlaksananya publikasi Hasil Musrenbang Tahun 2016	Jumlah publikasi hasil musrenbang Tahun 2016	5 Kecamatan, 57 Kelurahan	Publikasi Hasil Musrenbang Tahun 2016	135,000,000
			Terlaksananya Monitoring Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dan kecamatan	Jumlah Monitoring Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dan kecamatan	5 Kecamatan, 57 Kelurahan	Monitoring Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dan kecamatan	30,000,000
Terlaksananya SKPD yang RKA nya sesuai dengan usulan kegiatan yang ada di Renja	Prosentase SKPD yang RKA nya sesuai dengan usulan kegiatan yang ada di Renja	100%	Tersusunnya Dokumen KU APBD dan PPAS APBD 2017	Jumlah Dokumen KU APBD dan PPAS APBD 2017	1 dokumen	Penyusunan KU APBD dan PPAS APBD 2017	244,620,000
			Tersusunnya Dokumen KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2016	Jumlah Dokumen KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2016	1 dokumen	Penyusunan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2016	254,620,000
			Terlaksananya sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	120 orang, 6 kali	Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	128,000,000
			Terlaksananya integrasi Pembangunan Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	Jumlah aplikasi Integrasi Pembangunan Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	1 Aplikasi	Integrasi Pembangunan Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	187,942,000
			Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	Jumlah Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	1 Aplikasi	Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	307,270,000

Terlaksananya SKPD yang RENSTRA / RENJA nya diselesaikan tepat waktu	Prosentase SKPD yang RENSTRA / RENJA nya diselesaikan tepat waktu	100%	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja SKPD	Jumlah peserta Asistensi Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja SKPD	101 SKPD	Asistensi Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja SKPD	107,500,000
			Tersusunnya dokumen Renja RKPD 2017	Jumlah dokumen Renja RKPD 2017	1 dokumen	Penyusunan Renja RKPD 2017	94,260,000
			Terlaksananya Peningkatan kapasitas perencana/penyusun program	Jumlah peserta pelatihan Peningkatan Kapasitas Perencana/Penyusun Program	120 orang	Peningkatan kapasitas perencana/penyusun program	300,000,000
Terlaksananya indikator kinerja sasaran pada RKPD yang dirumuskan secara SMART	Prosentase indikator kinerja sasaran pada RKPD yang dirumuskan secara SMART	100%	Tersusunnya Perubahan RKPD Tahun 2016	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016	1 Dokumen	Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016	109,320,000
			Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan Fungsi TEPR)	Jumlah SKPD yang dievaluasi dan diawasi Realisasi Anggarannya	101 SKPD	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan Fungsi TEPR)	224,700,000
			Terlaksananya Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah	Jumlah Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah	101 SKPD	Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah	75,000,000
			Terlaksananya Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016	Jumlah dokumen Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016	1 dokumen	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016	81,860,000
			Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan	Jumlah evaluasi dan laporan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan	1 dokumen, 3 sumberdana	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan	183,384,000
			Tersosialisasinya ketentuan Dibiidang Cukai	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan dibiidang cukai	12 SKPD	Sosialisasi ketentuan Dibiidang Cukai	128,000,000
			Terlaksananya Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Malang	Jumlah pengendalian sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	35 SKPD	Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Malang	399,000,000

			Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah SKPD yang mendapat pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	12 SKPD	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	172,000,000	
			Tersusunnya Identifikasi dan Analisa Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Identifikasi dan Analisa Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Penyusunan Identifikasi dan Analisa Isu Strategis Pembangunan Daerah	140,000,000	
Tersusunnya Data SIPD	Jumlah Data SIPD	1136	Tersusunnya Profil Kota Malang	Jumlah Profil Kota Malang	2 Dokumen, 2 Bahasa	Penyusunan Profil Kota Malang	209,284,000	
			Tersusunnya data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)	Jumlah Data SIPD	1136	Penyusunan data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)	79,360,000	
Tersedianya Kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan ekonomi	Prosentase Kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan ekonomi	100%	Program perencanaan pembangunan ekonomi					
			Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang	175 orang	Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang	171,090,000	
			Tersusunnya Kajian Keamanan Pangan Guna meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka menghadapi MEA	Jumlah Dokumen Kajian Keamanan Pangan Guna meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka menghadapi MEA	1 dokumen	Kajian Keamanan Pangan Guna meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka menghadapi MEA	150,000,000	
			Tersusunnya Database Pelaku Ekonomi	Jumlah Dokumen Database Pelaku Ekonomi	1 dokumen	Penyusunan Database Pelaku Ekonomi	150,000,000	
			Tersusunnya Pengembangan Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Malang	Jumlah Dokumen Pengembangan Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Malang	1 dokumen	Penyusunan Pengembangan Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Malang	125,000,000	

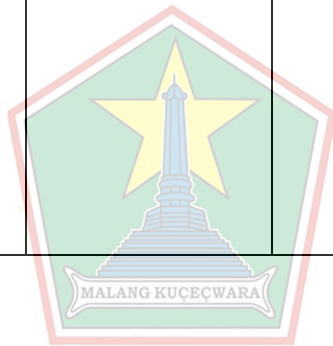
			Tesusunnya Analisa Dampak Ekonomi Bank Sampah Masyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang	Jumlah Dokumen Analisa Dampak Ekonomi Bank Sampah Masyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang	1 dokumen	Analisa Dampak Ekonomi Bank Sampah Masyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang	200,000,000	
			Tersusunnya Kajian Peran Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM	Jumlah Dokumen Kajian Peran Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM	1 dokumen	Kajian Peran Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM	200,000,000	
			Tersusunnya Profil Pangan dan Gizi Kota Malang	Jumlah Dokumen Profil Pangan dan Gizi Kota Malang	1 dokumen	Penyusunan Profil Pangan dan Gizi Kota Malang	59,522,500	
			Tersusunnya Analisa PDRB Kota Malang	Jumlah Dokumen Analisa PDRB Kota Malang	1 dokumen	Penyusunan Analisa PDRB Kota Malang	59,782,000	
			Terlaksananya Koordinasi Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang	Jumlah peserta koordinasi Komite ekonomi kreatif	40 orang	Koordinasi Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang	120,263,000	
			Program perencanaan sosial budaya					
Tersedianya kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan sosial budaya	Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan sosial budaya	100%	Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	65 orang, 4 kali	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	100,000,000	
			Tersusunnya Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang	Jumlah Dokumen Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang	1 dokumen	Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang	100,000,000	
			Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Koordinasi Pengembangan Kota Layak Anak	275 orang	Koordinasi Pengembangan Kota Layak Anak	260,000,000	
			Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Gender Kota Malang	Jumlah peserta bimbingan teknis perencanaan penganggaran responsif gender	165 orang	Penguatan Kelembagaan Gender Kota Malang	295,000,000	
			Tersusunnya Profil Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Profil Sosial Budaya	3 dokumen	Profil Sosial Budaya	133,200,000	

			Tersusunnya Rencana Aksi Penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota	1 dokumen	Rencana Aksi Penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota	125,000,000
			Tersusunnya Analisa Derajat Kesehatan	Jumlah Dokumen Analisa Derajat Kesehatan	1 dokumen	Analisa Derajat Kesehatan	250,000,000
			Tersusunnya Profil Kuliner Kota Malang	Jumlah Dokumen Profil Kuliner Kota Malang	1 dokumen	Profil Kuliner Kota Malang	150,000,000
			Tersusunnya Kajian Penambahan Prasarana Sekolah	Jumlah dokumen Kajian Penambahan Prasarana Sekolah	1 dokumen	Kajian Penambahan Prasarana Sekolah	200,000,000
			Tersusunnya Analisa Potensi Peredaran Uang di Pasar Tradisional	Jumlah Dokumen Analisa Potensi Peredaran Uang di Pasar Tradisional	1 dokumen	Analisa Potensi Peredaran Uang di Pasar Tradisional	250,000,000
			Tersusunnya Analisa Dampak Sosial Ekonomi Budaya Urban Mahasiswa Terhadap Masyarakat Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Dampak Sosial Ekonomi Budaya Urban Mahasiswa Terhadap Masyarakat Kota Malang	1 dokumen	Analisa Dampak Sosial Ekonomi Budaya Urban Mahasiswa Terhadap Masyarakat Kota Malang	150,000,000
			Terlaksananya Penganugerahan Inovasi Kota Malang	Jumlah peserta Penganugerahan inovasi Kota Malang	63 proposal	Penganugerahan Inovasi Kota Malang	347,747,000
			Terlaksananya Koordinasi Bidang Penelitian dan pengembangan	Jumlah Koordinasi Bidang Penelitian dan pengembangan	25 orang, 10 kali	Koordinasi Bidang Penelitian dan pengembangan	150,000,000
			Tersusunnya Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang	Jumlah Dokumen Data Kemiskinan dan Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Malang	1 dokumen	Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang	411,114,000
			Terlaksananya sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah peserta Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	70 orang, 7 kali	Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	200,000,000

Tercukupinya dokumen rencana tata ruang	Prosentase tercukupinya dokumen rencana tata ruang	100%	Program Perencanaan Tata Ruang				
			Terlaksananya Peringatan Hari Tata Ruang	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Tata Ruang Tahun 2016	7 Kegiatan	Peringatan Hari Tata Ruang	1,007,000,000
			Terlaksananya Festival Rancang Malang	Jumlah peserta Festival Rancang Malang	57 peserta	Festival Rancang Malang	300,000,000
			Terlaksananya Publikasi dan Penggandaan RDTR dan PZ	Jumlah publikasi dan penggandaan Perda RDTR dan PZ Kota Malang	72 eks	Publikasi dan Penggandaan RDTR dan PZ	250,000,000
			Terlaksananya Review Penyusunan Rencana Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen Review Rencana Kawasan Strategis Sosial Budaya dan Rencana Kawasan Strategis Ekonomi	1 Dokumen	Review Penyusunan Rencana Kawasan Strategis	350,000,000
			Terlaksananya Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-20130	Jumlah Dokumen Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030	1 Dokumen	Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030	675,000,000
Terlaksananya Monitoring PSU perumahan yang sesuai dengan rencana tata ruang	Prosentase Monitoring PSU perumahan yang sesuai dengan rencana tata ruang	100%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
			Terlaksananya Pengembangan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Pengembangan integrasi aplikasi SIPR serta pemeliharaan sistem	1 Aplikasi	Pengembangan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang	200,000,000
			Terlaksananya Monitoring PSU perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang dimonitoring	6 Perumahan	Monitoring PSU perumahan	100,000,000

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota Malang	11 Dokumen	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar				
			Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota	Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota	12 orang, 8 kali	Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota	150,000,000
			Tersusunnya Studi Kelayakan dan Konsep Desain Malang Art And Spatial Gallery	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan dan Konsep Desain Malang Art And Spatial Gallery	1 Dokumen	Penyusunan Studi Kelayakan dan Konsep Desain Malang Art And Spatial Gallery	200,000,000
			Tersusunnya Review Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Rencana Induk Jaringan Jalan Terintegrasi Malang Raya	Jumlah Dokumen Review Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Jaringan Jalan Terintegrasi Malang Raya	1 Dokumen naskah akademis, 1 Dokumen Ranperwal	Penyusunan Review Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Rencana Induk Jaringan Jalan Terintegrasi Malang Raya	200,000,000
			Tersusunnya Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1 Dokumen naskah akademis, 1 Dokumen Ranperwal	Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	100,000,000
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Program 100-0-100	Jumlah Dokumen Capaian Pengembangan Program 100-0-100	1 Dokumen	Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Program 100-0-100	200,000,000
			Tersusunnya Roadmap Malang Kota Berketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Road Map Land Banking Kota Malang	1 Dokumen	Penyusunan Roadmap Malang Kota Berketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	200,000,000

			Tersusunnya Roadmap Land Banking Kota Malang	Jumlah Dokumen Roadmap Land Banking Kota Malang	1 Dokumen	Penyusunan Roadmap Land Banking Kota Malang	200,000,000
			Tersusunnya Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)	Jumlah Dokumen Updating Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)	1 Dokumen	Penyusunan Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)	55,000,000
			Tersusunnya Updating Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)	Jumlah Dokumen Updating Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah	1 Dokumen	Penyusunan Updating Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)	55,000,000
			Tersusunnya Kajian kebijakan publik dalam perencanaan pembangunan Kota Malang	Jumlah Dokumen Kajian kebijakan publik dalam perencanaan pembangunan Kota Malang	1 dokumen	Kajian kebijakan publik dalam perencanaan pembangunan Kota Malang	600,000,000
			Tersusunnya Evaluasi Capaian Pengembangan Kota Hijau Malang	Jumlah dokumen database capaian mutakhir atribut kota hijau	1 Dokumen	Evaluasi Capaian Pengembangan Kota Hijau Malang	45,000,000



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JL. TUGU NOMOR 1 MALANG 65119 - TEL. 0341 - 366922 FAX. 0341 - 328771

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA KOTA MALANG

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Malang mengemban amanah masyarakat Kota Malang dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga memiliki kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja tahunan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Peaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Perencana Pembangunan Daerah tahun 2013 – 2018 dan Renja tahun 2016.

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran capaian indikator kinerja Badan Perencana Pembangunan Daerah menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah, sebagai berikut :

NO	KATAGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	> 85 – 100	Memuaskan
2.	A	> 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	> 65 – 75	Baik
4.	CC	> 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 – 50	Agak kurang
6.	D	> 0 - 30	Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100, Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
3. Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

4. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013 – 2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 4 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja.

Berikut target, realisasi dan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2016

PEMERINTAH KOTA MALANG
 Tabel 3. 1
 Target, Realisasi Dan Capaian Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	• Presentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik.	100 %	100%	100%
	• Presentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis.	100 %	100%	100%
	• Presentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT.	100 %	100%	100%
	• Presentase indikator sasaran pada RKP yang targetnya terpenuhi.	100 %	88,8%	88,8%

Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah.	Presentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi.	50%	58,72%	100%
Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan.	Presentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,90%	85%
Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan	Nilai Survy Kepuasan Masyarakat.	80,90	80,98	100%



Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 7 indikator sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah rata rata mencapai 91,26 % dan masuk dalam katagori sangat baik/berhasil

Dengan demikian maka secara umum Badan Perencanaan Pembangunan daerah telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BAPPEDA tahun 2013 – 2018.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2016 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian Kinerja	
		2015	2016	2015	2016
Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik. 	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis. 	100%	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT. 	52,5%	88,8%	58,3%	88,8%
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi. 				
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah	Prosentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi.	4,36%	58,72%	87,2%	100%
Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan.	Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	100%	80,90%	100%	85%
Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80,90	80,98	100%	100%

Dari tabel 3.2, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2016 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja 1 : Prosentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik

Rencana Strategis adalah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan landasan dan arah bagi kerja SKPD. Sedangkan Renja/RKT merupakan merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD pada tahun bersangkutan. Yang dimaksud dengan dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik adalah dokumen dimaksud disusun dengan berorientasi pada outcome, indicator dan taerget kinerjanya bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, logis dan terbatas waktu, serta memiliki keterkaitan dan konsistensi dengan RPJMD. Apabila kita bandingkan realisasi dan capaian kinerja prosentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik pada tahun 2016 dan tahun sebelumnya memiliki kesamaan capaian yaitu **100%**. Hal ini berarti bahwa dokumen Renstra dan Renja 35 SKPD yang dimonitoring dan dievaluasi oleh Bappeda mempunyai kualitas baik dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, terbukti dari nilai akuntabilitas kinerja Kota Malang yang mendapat nilai BB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana Renstra dan Renja SKPD merupakan salah satu point penilaian.

Indikator Kinerja 2 : Prosentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis.

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari kelurahan. Dalam melaksanakan Musrenbang, harus mengacu pada juknis yaitu pedoman pelaksanaan musrenbang yang disusun oleh Baadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan ditetapkan dengan

peraturan walikota. Apabila kita liat tabel 3.2 diatas, terlihat bahwa realisasi dan capaian kinerja Prosentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis pada tahun 2016 memiliki capaian yang sama dengan tahun 2015 yaitu **100%**. Ini berarti proses perencanaan pembangunan Kota Malang telah bersifat partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Indikator Kinerja 3: Presentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD untuk dilaksanakan oleh SKPD. Sedangkan Renja/RKT merupakan merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan data pada **tabel 3.2**, terlihat bahwa pada indikator kinerja Presentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT pada tahun 2016 dan tahun sebelumnya telah memenuhi target capaian yaitu 100%. Ini berarti Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD telah mendukung tercapainya tujuan dan sasaan SKPD dalam menjalankan tugas pokok fungsi sesuai bidang masing masing.

Indikator Kinerja 4 :Presentase indikator sasaran pada RKPDP yang targetnya terpenuhi.

RKPDP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Setiap RKPDP mempunyai indikator sasaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaan RKPDP. Dari **tabel 3.2** terlihat pada tahun 2016 terjadi kenaikan realisasi indikator kinerja walaupun belum memenuhi target 100% yaitu pada tahun 2015 tercapai 52,5% dari target 90%, sedangkan pada tahun 2016 tercapai 88,8% dari target 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.

- b. Sasaran Strategis:** Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayahpelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Indikator Kinerja: Presentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi.

Rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkatRDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan.Peraturan zonasi merupakan dokumen turunan dari RDTR yang berisi ketentuan yang harus diterapkan pada setiap zona peruntukan. Dalam peraturan zonasi dimuat hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan ruang, termasuk pengaturan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, penyediaan ruang terbuka hijau publik, dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Peraturan zonasi tersebut bersama dengan RDTR menjadi bagian ketentuan perizinan pemanfaatan ruang yang harus dipatuhi oleh pemanfaat ruang. Di Indonesia sendiri, secara legal peraturan zonasi merupakan instrumen yang baru dipakai yaitu sejak diundangkannya UU Penataan Ruang No.26/2007. Selanjutnya peraturan zonasi ditetapkan dengan :

1. Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;
2. Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
3. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan realisasi dan capaian indikator kinerja Prosentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi. Pada tahun 2015 dari target 5% tercapai realisasi 4,36% yaitu 479,86 Ha dari luas wilayah Kota Malang seluas 11.006 Ha. Sedangkan pada tahun 2016 tercapai realisasi sebesar 58,72% dari target sebesar 50% yaitu 6.462,72 Ha dari luas wilayah Malang 11.006 Ha. Peningkatan kinerja ini didukung oleh Penetapan 5 Perda RDTR dan zonasi bagian wilayah perkotaan, yang mana pada tahun 2015 hanya ada 1 perda RDTR dan zonasi BWP yaitu Malang utara (Perda Nomor 5 Tahun 2015). Pada tahun 2016 ditetapkan 5 Perda RDTR dan Zonasi BWP yaitu :

1. Malang Barat
2. Malang Tengah
3. Malang Timur
4. Malanag Tenggara
5. Malang Timut laut

Peraturan Daerah tentang RDTR dan Zonasi BWP merupakan pedoman yang digunakan untuk menentukan dan menghitung luas wilayah yang sesuai peruntukan.

- c. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan.

Indikator Kinerja : Presentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.

Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas sangat membutuhkan data yang valid, akurat dan terkini..Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam :

- Menyusun perencanaan
- Penetapan Perencanaan
- Melakukan Pengendalian/Pemantauan/monitoring, dan
- Melakukan Evaluasi program dan sasaran yang telah ditetapkan

Dalam tabel 3.2 terlihat bahwa dibanding dengan tahun 2015, realisasi dan capaian indikator tahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan perubahan pedoman penghitungan capaian indikator kinerja. Pada tahun 2016, penghitungan data pendukung perencanaan menggunakan metode yang lebih akurat yaitu Sistem Informasi Perencanaan daerah (SIPD) yang baru dilaksanakan Bappeda Kota Malang pada bulan Oktober 2015, sehingga pada tahun 2015 belum bisa digunakan sebagai pedoman/acuan. Penggunaan SIPD sebagai pedoman mengacu pada Undang – Undang 23 Tahun 2014 bab. X pasal 274 yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data informasi yang dikelola dalam SIPD yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah. Pada Tahun 2016, prosentase kecukupan data pendukung perencanaan daerah tercapai 80,90 yaitu 919 data dari 1136 data yang harus tersedia, dengan capaian indikator kinerja 85 % dari target 95%.


- d. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan

Indikator Kinerja : Nilai survey Kepuasan Masyarakat

Nilai survey kepuasan masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 yaitu 80,90 dari target 80,88 meningkat menjadi 80,98 dari target 80,90. Hal ini menunjukkan peningkatan pelayanan Bappeda dalam bidang perencanaan pembangunan daerah baik itu kepada pemangku kepentingan maupun SKPD terkait.

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target Jangka Menengah Renstra 2013 -2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah pada Renstra	Realisasi Kinerja	
		2018	2015	2016
 Meningkatkan kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik. 	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis. 	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT. 	100%	100%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi. 	100%	52,5%	88,8%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah pada Renstra	Realisasi Kinerja	
		2018	2015	2016
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi. 	100%	4,36%	58,72%
Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah. 	100%	100%	80,9%
Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 	80,98	80,90	80,98

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2016 dengan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target jangka Menengah 2018	Realisasi Kinerja 2016	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	• Prosentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik.	100%	100%	100%
	• Presentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis.	100%	100%	100%
	• Presentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT.	100%	88,8%	88,8%
	• Presentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi.	100%	88,8%	88,8%
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah	Prosentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi.	100%	58,72%	100%
Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan.	Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	100%	80,9%	85%
Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan	Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,98	80,98	100%

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa dari 7 indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sudah memenuhi target jangka menengah pada renstra adalah 5 indikator, sedangkan 2 indikator belum mencapai target jangka menengah pada renstra. Rata –rata capaian kinerja tahun 2016 mencapai mencapai 91,26% .

3.3. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2016

Sasaran/Indikator Kinerja	Prosentase Capaian	Rata- rata Capaian	Predikat			
			85 - 100	70 s/d <85	55 s/d <70	0 S/d <55
			Sangat berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Kurang Berhasil
Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah		88,8%				
Prosentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik.	100%		v			
Presentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis.	100%		v			
Presentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT	100%		v			
Presentase indikator sasaran pada RKP yang targetnya terpenuhi.	88,8%		v			
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah		100%				
Prosentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi.	100%		v			

Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan.		85%				
Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	85%		v			
Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan		100%				
Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	100%		v			

Dari tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran indikator kinerja tahun 2016, secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam katagori sangat berhasil, walaupun ada 2 indikator yang belum memenuhi target.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut :



a. **Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah**

PEMERINTAH KOTA MALANG
BAPPEDA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JL. TUGU NOMOR 1 MALANG 65119 - TEL. 0341 - 366922 FAX. 0341 - 328771

Dari Tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan 4 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **sangat berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 88,8 %, walaupun belum dapat mencapai target capaian 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah:

1. Belum optimalnya penerapan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, terutama kedisiplinan tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati. Sehingga pelaksanaan perencanaan kurang berjalan maksimal. Solusi terhadap permasalahan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan membuat action paln dengan tahapan dan jadwal sesuai dengan Peremendagri Nomor 54 tahun 2010 dan akan disosialisasikan ke semua SKPD dan berusaha untuk ditepati.

2. Belum optimalnya asistensi penyusunan dokumen perencanaan kepada SKPD. Amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, diiringi dengan perubahan tugas pokok fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana kedepan Bappeda memiliki posisi yang lebih strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Menyikapi hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembanguna Daerah melakukan hal sebagai berikut :
 - a. Bappeda akan membentuk tim koordinator yang membawahi beberapa SKPD dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan asistensi setiap tahapan pelaksanaan perencanaan kepada SKPD.
 - b. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan bimbingan teknis, diklat, sosialisasi, diskusi ataupun seminar tentang perencanaan pembangunan.

b. Sasaran Strategis : Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi terhadap kinerja sasaran meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah pelaksanaan rencana pembangunan daerah menunjukkan predikat **sangat berhasil**, dengan capaian 100% dari target 100%. Keberhasilan ini didukung oleh penetapan 5 Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penetapan zonasi Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) pada tahun 2016 yang merupakan pedoman penataan wilayah dan tata ruang di Kota Malang.

Amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Penataan tata ruang kota ini kedepannya bukan lagi menjadi tugas pokok fungsi Bappeda tetapi berpindah ke Dinas Pekerjaan Umum. Beberapa hal yang perlu dilakukan agar target capaian tahun depan dapat tercapai salah satunya adalah meningkatkan prosentase ruang terbuka hijau dan pengembangan perumahan.

c. Sasaran Strategis : Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan.

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan menunjukkan predikat **sangat berhasil** yaitu mencapai 85%, walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis yaitu 95%.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan akan diperbaiki untuk pelaksanaan kedepan adalah :

1. Belum optimalnya pengisian data Sistem Informasi Perencanaan Daerah, karena ada beberapa data yang sumbernya tergantung pada instansi lain yaitu BPS. Kedepan, Bappeda akan meningkatkan koordinasi dengan BPS dan Bappeda Propinsi Jawa Timur terkait petunjuk teknis pengisian data.
2. Peningkatan kompetensi admin Sistem Informasi Perencanaan Daerah.

d. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan

Dari tabel 3.5 diatas terlihat, berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan menunjukkan predikat **sangat berhasil** dengan capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah semakin optimal yaitu :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor, dalam hal ini adalah kurang memadainya ruangan kantor dibanding dengan jumlah staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan tuntutan pelaksanaan tugas pokok fungsi serta pelayanan kepada pemangku kepentingan dan SKPD dalam bidang perencanaan.
2. Kompetensi aparatur perlu ditingkatkan terutama dalam bidang perencanaan Pembangunan Daerah.

3.4. ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBERDAYA

Sumberdaya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan adalah Sumberdaya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2016 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Prosentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik	100%	87%	13%
	Presentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis.	100 %	91,97%	8,03%
	Presentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT	100%	97%	3%
	Presentase indikator sasaran pada RKP D yang targetnya terpenuhi.	88,8%	94,47%	-5,67%
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah	Prosentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi.	100 %	94,2%	5,8%
Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	85%	88,28%	-3,28%
Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan	Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	100%	70%	30%

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa dari 7 indikator kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hanya ada 2 indikator kinerja yang penggunaan sumberdaya anggarannya kurang efisien, sedangkan 5 indikator lainnya sangat efisien.

Sumberdaya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan berjumlah 33 orang dengan rincian 17 pejabat struktural dan 16 staf. Dengan jumlah aparatur pelaksana yang terbatas, Bappeda memiliki tanggungjawab yang besar dalam merencanakan Pembangunan Daerah Kota Malang yang merupakan Kotabesar Kedua di Jawa Timur dengan luas wilayah 11.006 ha yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan didukung anggaran sebesar Rp. 15.689.551.000,- dan terserap sebesarRp. 13.830.383.788,-.

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan dengan rata- rata capaian 91,26%.

3.5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG Mendukung Keberhasilan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016 didukung 12 program dan 90 kegiatan dengan uraian capaian program kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7

Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan daerah tahun 2016

Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
A.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
1.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2017			
	Input :	252,600,000	250,170,500	99%
	Output : Jumlah peserta musrenbang	200 org	200 org	100%
	Outcome : Prosentase Kecamatan yang melaksanakan musrenbang sesuai juknis	100%	100%	100%

2.	Penyusunan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2016			
	Input :	254,620,000	231,169,000	91%
	Output : Jumlah dokumen KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2016	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Outcome : Jumlah SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT	100%	100%	100%
3.	Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016			
	Input :	109,320,000	108,202,000	99%
	Output : Jumlah dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Outcome : Presentase Indikator Sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	100%	88,88%	88,88%
4.	Penyusunan KU APBD dan PPAS APBD 2017			
	Input :	244,620,000	236,940,000	97%
	Output : Jumlah dokumen KU APBD dan PPAS APBD 2017	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Jumlah SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT	100%	100%	100%
5.	Asistensi Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja SKPD			
	Input :	107,500,000	103,472,000	96%
	Output : Jumlah peserta Asistensi Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja SKPD	101 SKPD	101 SKPD	100%
	Outcome : Prosentase SKPD yang telah menyusun dokumen renstra dan renja/RKT berkualitas baik	100 %	100%	100%
6.	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016			
	Input :	81,860,000	81,210,000	99%
	Output : Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016	1 Dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Presentase Indikator Sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	100%	88,88%	88,88%
7.	Penyusunan Renja RKPD 2017			
	Input :	94,260,000	92,410,000	98%
	Output : Jumlah dokumen renja SKPD 2017	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase SKPD yang telah menyusun	100%	100%	100%

	dokumen renstra dan renja/RKT berkualitas baik			
8.	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017			
	Input :	183,720,000	149,470,000	81%
	Output : Jumlah peserta Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017	1 Dokumen, 5Kecamatan, 57 Kelurahan	1 Dokumen, 5 Kecamatan, 57 Kelurahan	100%
	Outcome : Prosentase Kecamatan yang melaksanakan musrenbang sesuai juknis	100%	100%	100%
9.	Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Input :	128,000,000	123,329,900	96%
	Output : Jumlah sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	120 orang, 6 kali	120 orang, 6 kali	100%
	Outcome : Jumlah SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT	100%	100%	100%
10.	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan Fungsi TEPR)			
	Input :	224,700,000	193,370,700	86%
	Output : Jumlah SKPD yang dievaluasi dan diawasi Realisasi Anggarannya	101 SKPD	101 SKPD	100%
	Outcome : Presentase Indikator Sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	100%	88,8%	88,8%
11.	Publikasi Hasil Musrenbang Tahun 2016			
	Input :	135,000,000	124,110,000	92%
	Output : Publikasi Hasil Musrenbang Tahun 2016	5 Kecamatan, 57 Kelurahan	5 Kecamatan, 57 Kelurahan	100%
	Outcome : Prosentase Kecamatan yang melaksanakan musrenbang sesuai juknis	100%	100%	100%
12.	Penyusunan Identifikasi dan Analisa Isu Strategis Pembangunan Daerah			
	Input :	140,000,000	139,386,000	99.6%
	Output : Jumlah dokumen identifikasi dan Analisa Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Presentase Indikator Sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	100%	88,8%	88,8%
13.	Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah			
	Input :	75,000,000	66,715,000	89.0%
	Output : Jumlah Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah	101 SKPD	101 SKPD	100%
	Outcome : Presentase Indikator Sasaran pada RKPD	100%	88,8%	88,8%

	yang targetnya terpenuhi			
14.	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan			
	Input :	183,384,000	161,410,350	88%
	Output : Jumlah Evaluasi dan laporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan	3 sumberdana, 1 dokumen laporan	3 sumberdana, 1 dokumen laporan	100%
	Outcome : Persentase Indikator Sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	100%	88,8%	88,8%
15.	Sosialisasi ketentuan Dibidang Cukai			
	Input :	128,000,000	111,439,000	87.1%
	Output : Jumlah peserta sosialisasi ketentuan Dibidang Cukai	12 SKPD	19 SKPD	158%
	Outcome : Presentase Indikator Sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	100%	88,8%	88,8%
16.	Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Malang			
	Input :	399,000,000	343,146,300	86.0%
	Output : Jumlah Pengendalian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Malang	35 SKPD	35 SKPD	100%
	Outcome : Prosentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	100%	88,8%	100%
17.	Monitoring Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dan kecamatan			
	Input :	30,000,000	29,296,000	97.7%
	Output : Jumlah Monitoring Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dan kecamatan	5 Kecamatan, 57 Kelurahan	5 Kecamatan, 57 Kelurahan	100%
	Outcome : Prosentase Kecamatan yang melaksanakan musrenbang sesuai juknis	100%	100%	100%
18.	Peningkatan kapasitas perencana/penyusun program			
	Input :	300,000,000	291,081,000	97.0%
	Output : Jumlah peserta Peningkatan kapasitas perencana/penyusun program	120 orang	120 orang	100%
	Outcome : Presentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik	100%	100%	100%
19.	Integrasi Pembangunan Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran			
	Input :	187,942,000	186,593,000	99.3%
	Output : Jumlah aplikasi Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
	Outcome :	100%	100%	100%

	Jumlah SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT			
20.	Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran			
	Input :	307,270,000	282,401,600	91.9%
	Output : Jumlah Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
	Outcome : Jumlah SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT	100%	100%	100%
21.	Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai			
	Input :	172,000,000	136,242,376	79.2%
	Output : Jumlah SKPD yang mendapat Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	12 SKPD	19 SKPD	158%
	Outcome : Presentase Indikator Sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	100%	88,8%	88,8%
B	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			
1.	Penyusunan Profil Kota Malang			
	Input :	209,284,000	153,904,000	73.5%
	Output : Jumlah Profil Kota Malang	2 dokumen, 2 bahasa	2 dokumen, 2 bahasa	100%
	Outcome : Presentase Indikator Sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	100%	88,8%	88,8%
2.	Penyusunan data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)			
	Input :	79,360,000	74,457,000	93.8%
	Output : Jumlah data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)	1136 data	919 data	80,9%
	Outcome : Presentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi	100%	88,8%	88,8%

Dari Tabel diatas terlihat bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dianggarkan sebesar

Rp. 4.219.240.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.671.825.726,- (87,025%) dan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran 88,8%.

Sasaran Strategis : Meningkatkan tertib pemanfaatan ruang wilayah pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
A.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG			
1.	Peringatan Hari Tata Ruang			
	Input :	1,007,000,000	978,427,400	97%
	Output : Jumlah kegiatan Peringatan Hari Tata Ruang	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
2.	Festival Rancang Malang			
	Input :	300,000,000	295,192,500	98%
	Output : Jumlah peserta Festival Rancang Malang	57 peserta	76 peserta	133%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
3.	Publikasi dan Penggandaan RDTR dan PZ			
	Input :	250,000,000	230,920,000	92.4%
	Output : Jumlah Publikasi dan Penggandaan RDTR dan PZ	72 eksemplar	72 eksemplar	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
4.	Review Penyusunan Rencana Kawasan Strategis			
	Input :	350,000,000	348,350,000	99.5%
	Output : Jumlah Dokumen Review Penyusunan Rencana Kawasan Strategis	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
5.	Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-20130			
	Input :	675,000,000	604,640,000	89.6%
	Output : Jumlah dokumen Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-20130	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya	50%	58,72%	100%

telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi			
---	--	--	--

B.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
1.	Pengembangan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang			
	Input :	200,000,000	194,906,000	97.5%
	Output : Jumlah Pengembangan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
2.	Monitoring PSU perumahan			
	Input :	100,000,000	64,670,300	64.7%
	Output : Jumlah PSU perumahan Yang dimonitoring	6 Perumahan	6 Perumahan	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
C.	POGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA KOTA MENENGAH DAN BESAR			
1.	Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota			
	Input :	150,000,000	135,278,000	90.2%
	Output : Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota	12 Orang, 8 kali	12 Orang, 8 kali	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
2.	Penyusunan Studi Kelayakan dan Konsep Desain Malang Art And Spatial Gallery			
	Input :	200,000,000	194,244,000	97.1%
	Output : Jumlah dokumen Studi Kelayakan dan Konsep Desain Malang Art And Spatial Gallery	1 Dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
3.	Penyusunan Review Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Rencana Induk Jaringan Jalan Terintegrasi Malang Raya			
	Input :	300,000,000	271,057,000	90.4%
	Output : Jumlah dokumen Review Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Rencana Induk Jaringan Jalan Terintegrasi Malang Raya	1 Dokumen naskah akademis, 1 Dokumen	1 Dokumen naskah akademis, 1 Dokumen	100%

		Ranperwal	Ranperwal	
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
4.	Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga			
	Input :	200,000,000	189,192,000	94.6%
	Output : Jumlah dokumen Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1 dokumen naskah akademis, 1 dokumen ranperwal	1 dokumen naskah akademis, 1 dokumen ranperwal	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
5.	Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Program 100-0-100			
	Input :	100,000,000	64,230,000	64.2%
	Output : Jumlah dokumen Capaian Pengembangan Program 100-0-100	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
6.	Penyusunan Roadmap Malang Kota Berketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			
	Input :	200,000,000	199,340,000	99.7%
	Output : Jumlah Dokumen Roadmap Malang Kota Berketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
7.	Penyusunan Roadmap Land Banking Kota Malang			
	Input :	200,000,000	199,560,000	99.8%
	Output : Jumlah dokumen Roadmap Land Banking Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
8.	Penyusunan Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)			
	Input :	55,000,000	53,750,000	97.7%
	Output : Jumlah dokumen Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%

9.	Penyusunan Updating Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)			
	Input :	55,000,000	53,100,000	96.5%
	Output : Jumlah dokumen Updating Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
10.	Kajian kebijakan publik dalam perencanaan pembangunan Kota Malang			
	Input :	600,000,000	577,000,000	96.2%
	Output : Jumlah dokumen Kajian kebijakan publik dalam perencanaan pembangunan Kota Malang	1 dokumen	1 Dokumen	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%
11.	Evaluasi Capaian Pengembangan Kota Hijau Malang			
	Input :	45,000,000	43,845,000	97.4%
	Output : Jumlah dokumen Evaluasi Capaian Pengembangan Kota Hijau Malang	1 dokumen	1 Dokumen	100%
	Outcome : Prosentaseluas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan zonasi	50%	58,72%	100%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya indikator kinerja sasaranmm meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, hal ini terlihat dari capaian output yang rata rata mencapai 100% dan capaian outcome 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.697.702.200,- (94,2%) dari anggaran Rp. 4.987.000.000,-.

Sasaran Strategis : Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
A.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI			
1.	Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang			
	Input :	171,090,000	148,797,300	87%
	Output : Jumlah peserta Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang	175 org	165 orang	94.3%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85.2%
2.	Kajian Keamanan Pangan Guna meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka menghadapi MEA			
	Input :	150,000,000	141,493,000	94%
	Output : Jumlah dokumen Kajian Keamanan Pangan Guna meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka menghadapi MEA	1 dokumen	1 Dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
3.	Penyusunan Database Pelaku Ekonomi			
	Input :	150,000,000	146,822,000	98%
	Output : Jumlah Database Pelaku Ekonomi	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
4.	Penyusunan Pengembangan Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Malang			
	Input :	125,000,000	146,822,000	117.46%
	Output : Jumlah dokumen Pengembangan Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung	95%	80,9%	85%

perencanaan pembangunan daerah.			
---------------------------------	--	--	--

5.	Analisa Dampak Ekonomi Bank Sampah Masyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang			
	Input :	200,000,000	194,152,000	97.08%
	Output : Jumlah dokumen Analisa Dampak Ekonomi Bank Sampah Masyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
6.	Kajian Peran Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM			
	Input :	200,000,000	199,602,000	99.80%
	Output : Jumlah dokumen Kajian Peran Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
7.	Penyusunan Profil Pangan dan Gizi Kota Malang			
	Input :	59,522,500	54,451,500	91.48%
	Output : Jumlah dokumen Profil Pangan dan Gizi Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
8.	Penyusunan Analisa PDRB Kota Malang			
	Input :	59,782,000	54,861,000	91.77%
	Output : Jumlah dokumen Analisa PDRB Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
9.	Koordinasi Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang			
	Input :	120,263,000	8,313,000	6.91%
	Output : Jumlah peserta Koordinasi Komite Ekonomi	40 org	32 orang	80%

	Kreatif Kota Malang			
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
B.	Program perencanaan sosial budaya			
1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya			
	Input :	100,000,000	41,598,000	41.60%
	Output : Jumlah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	65 Orang, 4 kali	65 orang , 2 kali	50%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
2.	Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang			
	Input :	100,000,000	97,162,000	97.16%
	Output : Jumlah dokumen Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
3.	Koordinasi Pengembangan Kota Layak Anak			
	Input :	260,000,000	241,355,720	92.83%
	Output : Jumlah Koordinasi Pengembangan Kota Layak Anak	275 orang	240 orang	87.27%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
4.	Penguatan Kelembagaan Gender Kota Malang			
	Input :	295,000,000	200,285,950	67.89%
	Output : Jumlah peserta bimtek Penguatan Kelembagaan Gender Kota Malang	165 orang	154 orang	93.33%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
5.	Profil Sosial Budaya			
	Input :	133,200,000	126,469,500	94.95%
	Output :	3 dokumen	3 dokumen	100%

	Jumlah dokumen Profil Sosial Budaya			
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
6.	Rencana Aksi Penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota			
	Input :	125,000,000	120,380,000	96.30%
	Output : Rencana Aksi Penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
7.	Analisa Derajat Kesehatan			
	Input :	250,000,000	248,860,000	99.54%
	Output : Jumlah dokumen analisa Derajat Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
8.	Profil Kuliner Kota Malang			
	Input :	150,000,000	148,182,000	98.79%
	Output : Jumlah dokumen Profil Kuliner Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
9.	Kajian Penambahan Prasarana Sekolah			
	Input :	200,000,000	199,382,500	99.69%
	Output : Jumlah Kajian Penambahan Prasarana Sekolah	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
10.	Analisa Potensi Peredaran Uang di Pasar Tradisional			
	Input :	250,000,000	248,964,000	99.59%
	Output : Jumlah dokumen Analisa Potensi Peredaran Uang di Pasar Tradisional	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome :	95%	80,9%	85%

Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.			
---	--	--	--

11.	Analisa Dampak Sosial Ekonomi Budaya Urban Mahasiswa Terhadap Masyarakat Kota Malang			
	Input :	150,000,000	149,090,000	99.39%
	Output : Jumlah dokumen Analisa Dampak Sosial Ekonomi Budaya Urban Mahasiswa Terhadap Masyarakat Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
12.	Penganugerahan Inovasi Kota Malang			
	Input :	347,747,000	324,919,400	93.44%
	Output : Jumlah peserta penganugerahan Inovasi Kota Malang	63 proposal	63 proposal	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
13.	Koordinasi Bidang Penelitian dan pengembangan			
	Input :	150,000,000	141,607,100	94.40%
	Output : Jumlah Koordinasi Bidang Penelitian dan pengembangan	25 orang, 10 kali	25 orang, 10 kali	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
14.	Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang			
	Input :	411,114,000	295,894,300	71.97%
	Output : Jumlah dokumen Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%
15.	Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan			
	Input :	200,000,000	192,710,000	96.36%
	Output : Jumlah peserta Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	70 orang, 7 kali	70 orang, 7 kali	100%
	Outcome : Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah.	95%	80,9%	85%

Tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran telah dilaksanakan dengan baik, Hal ini

terlihat bahwa dengan realisasi anggaran sebesar Rp, 3.847.060.270,- (88,28%) dari anggaran Rp. 4.357.718.500,- tercapai indikator kinerja sasaran sebesar 80,9%.

Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas pelayanan Perencanaan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1.	Penyediaan jasa surat menyurat			
	Input :	35,000,000	28,418,300	81.20%
	Output : Jumlah surat keluar masuk selama 1 tahun	2500 surat	4390 surat	175.6%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
	Input :	37,500,000	11,462,500	30.57%
	Output : Layanan belanj telepon, air dan listrik	2 pesawat telpon, 12 bulan	2 pesawat telpon, 12 bulan	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
3.	Penyediaan alat tulis kantor			
	Input :	60,000,000	55,637,000	92.73%
	Output : Jumlah alat tulis kantor	49 Jenis ATK	49 Jenis ATK	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100.1%
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor			
	Input :	75,000,000	72,806,000	97.07%
	Output : Jumlah jasa kebersihan	300 kali	300 kali	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			
	Input :	45,000,000	44,750,000	99.44%
	Output :	16 jenis	16 jenis	100%

	Jumlah barang cetakan dan pengadaan			
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			
	Input :	10,000,000	10,000,000	100%
	Output : jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	2 jenis	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
7.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			
	Input :	100,000,000	91,970,892	91.97%
	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 buah	4 buah	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			
	Input :	10,000,000	8,040,000	
	Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 jenis koran 50 buku	4 jenis koran 50 buku	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
9.	Penyediaan makanan dan minuman			
	Input :	250,000,000	106,552,000	42.62%
	Output : Jumlah makanan dan minuman	3750 nasi kotak, 3750 kue kotak	1800 nasi kotak, 1600 kue kotak	45%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			
	Input :	660,852,500	529,988,400	80.20%
	Output : Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85 kali	86 kali	101.18%
	Outcome :	80,9	80,98	100%

Nilai Survy Kepuasan Masyarakat			
---------------------------------	--	--	--

11.	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa			
	Input :	51,000,000	51,000,000	100%
	Output : Jumlah dokumrn pengadaan Barang/jasa	50 dokumen	50 dokumen	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
12.	Pawai Pembangunan			
	Input :	25,000,000	24,600,000	98.40%
	Output : Jumlah mobil hias	2 buah	2 buah	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
13.	Pengembangan Sistem Informasi Internal SKPD			
	Input :	50,000,000	46,792,600	93.59%
	Output : Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Internal SKPD	1 aplikasi	1 Aplikasi	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
14.	Pengadaan Mesin Absensi Fingerprint			
	Input :	10,000,000	5,665,000	56.65%
	Output : Jumlah Mesin Absensi Fingerprint	1 buah	1 buah	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
B..	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
1.	Pengadaan mebeleur			
	Input :	150,000,000	142,388,000	94.93%
	Output : Jumlah peralatan mebeleur kantor	4 jenis	4 jenis	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%

2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			
	Input :	170,000,000	67,421,000	39.66%
	Output : Jumlah kendaraan dinad yang dipelihara	3 mobil 16 sepeda motor	3 mobil 16 sepeda motor	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			
	Input :	10,000,000	5,070,000	50.70%
	Output : Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	15 AC, 2 notebook, 8 printer	15 AC, 2 notebook, 8 printer	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
C.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR			
1.	Pendidikan dan pelatihan formal			
	Input :	50,000,000		-
	Ouput : Terbentuknya SDM yang profesional	4 orang		-
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
D.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			
	Input :	7,500,000	6,650,000	88.67%
	Output : Jumlah Laporan kinerja	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
2.	Penyusunan laporan keuangan semesteran			
	Input :	64,000,000	64,000,000	100%
	Output : Junlah Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	100%

Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
---	------	-------	------

3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran			
	Input :	6,000,000	5,999,900	100%
	Output : Jumlah dokumen RKA	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
4.	Penatausahaan keuangan			
	Input :	30,000,000	29,994,000	99.98%
	Output : Jumlah penatausahaan keuangan dan lpaoran keuangan	5 Laporan (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, CALK), 727 SPP, 727 SPM	5 Laporan (LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, CALK), 727 SPP, 727 SPM	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
5.	Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK)			
	Input :	191,800,000	1,900,000	1%
	Output : Jummlah dokumen Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK)	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Outcome : Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
E.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			
1.	Fasilitasi Dewan Riset Daerah			
	Input :	218,740,000	210,590,000	96.3%
	Output : Jumlah Buku Agenda Riset Daerah (ARD) dan 50 Buku SIDA	50 ekseplar	50 eksemplar	100%

Outcome : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80,9	80,98	100%
--	------	-------	------

Tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan telah dilaksanakan dengan baik, Hal ini terlihat bahwa dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.615.695.592 (70%) dari anggaran sebesar Rp 2.317.392.500,-tercapai indikator kinerja sasaran sebesar 100%.

3.7. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2016 setelah perubahan sebesar Rp. 15,689,551,000 (Lima belas milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh satu Ribu Rupiah) dan mengalami peningkatan disbanding tahun 2015 sebagaimana tabel sebagai berikut :



Tabel.3.8
Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2015 dan 2016

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2016	%
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 14.594.968.000,00	Rp. 15.689.551.000,00	6,9

Anggaran belanja langsung tersebut dialokasikan untuk mendanai 11 program dan 90 kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, dengan rician realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.9

Tabel Realisasi Per Program Tahun 2016

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,419,352,500	1,087,682,692	76,63

2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	330,000,000	214,879,000	65,11
3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50,000,000	-	-
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	299.300.000	102.543.898	34,26
5.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	218,740,000	210,590,000	96,27
6.	Program perencanaan pembangunan daerah	3.738.796.000	3.441.564.728	92,05
7.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	288,644,000	228,361,000	79,11
8.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	2,105,000,000	1,980,596,000	94,09
9.	Program Perencanaan Tata Ruang	2,582,000,000	2,457,529,900	95,17
10.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	300,000,000	259,576,300	86,52
11.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1,235,657,500	1,070,199,800	86,60
12.	Program perencanaan sosial budaya	3,122,061,000	2,776,860,470	88,94
	J U M L A H	15.689.551.000	13.830.383.788	88,15

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.830.383.788 dari total anggaran Rp. 15.689.551.000,- atau 88,15 %. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2015 maka mengalami kenaikan sebesar 0,86 % yaitu pada tahun 2015 dari total anggaran sebesar Rp.14.594.968.000 terealisasi sebesar Rp 12.740.241.425,- atau 87,15%.

BAB IV PENUTUP

Tinjauan Umum Tentang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang merupakan media komunikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Media komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Malang pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Review Renstra Bappeda Kota Malang 2013-2018. Disamping itu penyusunan LAKIP ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bappeda Kota Malang pada tahun-tahun mendatang.

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang pada tahun 2016 capaian kinerja kegiatan dari 90 Kegiatan yang dilaksanakan mencapai 91,26%. Pada tahun 2015 pencapaian kinerja dari 100 Kegiatan yang direncanakan tercapai 87,29 %. sehingga jika dibandingkan maka pada tahun 2016 terdapat peningkatan kinerja.

Kendala Dari Pelaksanaan

Dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang pada tahun 2016 melaksanakan 90 Kegiatan dengan target capaian kerjanya masing-masing.

Dari kegiatan dan program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran yang tertuang didalam Review Renstra Bappeda Kota Malang 2013-2018, kinerja Bappeda Kota Malang pada tahun 2016 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan juga dijumpai adanya beberapa kendala, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target yang diinginkan.

Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan Bappeda Kota Malang Tahun 2016 adalah :

1. Kurangnya Sinergitas Data mengenai kemiskinan;
2. Kurangnya pemahaman akan fungsi SKPD tentang fungsi Rensponsif Gender;
3. Untuk kegiatan yang dilakukan melalui metode swakelola, sebagian besar kegiatan bergantung pada pemenuhan data oleh SKPD atau instansi vertikal (khususnya BPS);
4. Kesulitan dalam meminta SKPD/instansi vertikal untuk memenuhi data yang diminta atau dibutuhkan, baik dikarenakan data tersebut tidak tersedia pada database SKPD/instansi vertikal maupun pemenuhan/pengiriman data oleh SKPD/instansi vertikal seringkali terlambat/melewai batas waktu yang ditentukan.

Adapun permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan koordinasi terus menerus dengan instansi vertikal sebagai upaya perbaikan kinerja ditahun yang akan datang. Sedangkan Pemecahan masalah dari kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan database terkait kemiskinan yang merupakan hasil sinergi semua SKPD;
2. Memaksimalkan fungsi Tim Driver PUG;
3. Perlu menyusun suatu mekanisme pemenuhan data oleh SKPD yang mencakup pengaturan tentang kewajiban SKPD dalam memenuhi kebutuhan data perencanaan pembangunan berikut sanksi/punishment apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan;
4. Melakukan kerjasama dengan instansi vertical dalam rangka pengumpulan/pemenuhan data melalui mekanisme kerjasama sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang ini dapat menjadi bahan atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kota Malang. Semoga pada tahun mendatang kinerja Bappeda Kota Malang dapat semakin ditingkatkan searah dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Malang selaku perencana dan koordinator pembangunan di Kota Malang.



BAREN LITBANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tugu Nomor 1 Malang 65119 - Tel. 0341 - 366922 Fax. 0341 - 328771

1. Rencana Kinerja Tahun 2016